

PEMAHAMAN KADER PIMPINAN KOMISARIAT PERGURUAN TINGGI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)-IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN

Ricky Rahmanto

10040254213 (Prodi S1 PPKn, FIS, UNESA) rickyrahmantopkn@yahoo.com

Muhammad Turhan Yani

0001037704 (PPKn, FIS, UNESA) mturhanyaniyani@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Kader Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya tentang Wawasan Kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang Wawasan Kebangsaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa berdasarkan sub materi wawasan kebangsaan memiliki pemahaman yang sangat baik pada sub materi pengertian wawasan kebangsaan dengan perolehan persentase sebesar 83%. Kemudian pada sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan, unsur wawasan kebangsaan, dan upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan memiliki pemahaman yang baik dengan perolehan persentase sebesar 68% pada sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan, 76% pada sub materi unsur wawasan kebangsaan, dan 75% pada sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: Pemahaman, Wawasan Kebangsaan, Organisasi IPNU-IPPNU.

Abstract

The purpose of this research to know the understanding of Cadres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya about Nationality Insight. This research used the quantitative approach by quantitative descriptive method. This Data Collection Technique that's using such as test. Test used to the measure about understanding of Cadres PKPT IPNU-IPPNU which located at Universitas Negeri Surabaya about Nationality Insight. The samples were using about thirty respondents. The result of this research is the understanding of Cadres PKPT IPNU-IPPNU which is located at Universitas Negeri Surabaya based on sub material about nationality insight which very good understanding on sub material the definition of nationality insight with percentage about eighty three percent. And then on sub material of value nationality insight, elements of nationality insight, and the effort of nationality insight improvement which have good understanding the percentage about sixty eight percent on sub material of value nationality insight, seventy six percent on sub material elements of nationality insight, and seventy five percent on sub material the effort of nationality insight improvement.

Keywords: Understanding, Nationality Insight, IPNU-IPPNU Organization.

PENDAHULUAN

Realita globalisasi semakin meluas di berbagai penjuru daerah di seluruh dunia. Hampir semua negara tidak dapat terhindar dari pengaruh globalisasi. Hal ini terjadi karena dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin berkembang pesat dan canggih. Globalisasi merupakan proses global, mendunia, masing-masing belahan dunia seolah menyatu, transparan, dan saling ketergantungan (Astawa, 2011:4). Lebih lanjut, globalisasi diyakini dapat menyebabkan bebas keluar masuknya pengaruh asing. Dengan adanya pengaruh asing tersebut, maka hal inilah yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat bahkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya

sebatas dampak sosial, melainkan lebih luas hingga berdampak pada politik suatu negara.

Globalisasi awalnya marak diperbincangkan pada abad XX. Namun ketika memasuki abad XXI, globalisasi semakin berkembang secara cepat dan meluas sehingga tanpa disadari telah merasuki kehidupan masyarakat dunia. Semua masyarakat tentu merasa diuntungkan dengan adanya globalisasi, seperti halnya dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di negara lain saat ini. Namun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini tentu berbeda, yang kemudian patut diwaspadai dan dihadapi dengan bijak serta perlu kesiapan, baik dari negara maupun masyarakat agar tidak terlena terhadap kenikmatan globalisasi yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan bangsa dan negara sendiri.

Globalisasi semakin menguat di Indonesia sejak adanya perjanjian *free trade area* atau kawasan perdagangan bebas antar negara bahkan seluruh negara. Globalisasi awalnya dikenalkan melalui organisasi perdagangan dunia yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Organisasi tersebut mengupayakan kemudahan perdagangan bebas, yang kemudian di lain pihak menilai justru akan menguntungkan bagi negara-negara penganut kapitalisme.

Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, globalisasi sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya (Fakih, 2011:211).

Lebih lanjut, globalisasi dicurigai sebagai bentuk baru dari imperialisme dan kolonialisme. Globalisasi yang merupakan imperialisme dan kolonialisme modern tidak lagi menjajah fisik namun menjajah suatu negara atau bangsa melalui ideologi sehingga globalisasi bagaikan dua sisi mata uang koin karena globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia namun juga dapat memberikan dampak yang negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, adanya keterbukaan informasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang semakin mudah dan cepat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, munculnya sikap individualisme dan kebarat-baratan, informasi yang tak terkendali, kesenjangan sosial yang semakin besar serta pola hidup yang konsumtif.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dengan adanya globalisasi. Tantangan pertama, yaitu adanya tekanan dari luar, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan ideologi. Hal ini dapat terlihat dari adanya “paksaan” untuk mengikuti perdagangan bebas yang merupakan wujud keterbukaan globalisasi. Hanya terdapat dua pilihan, mengikuti alur perdagangan bebas namun dirugikan atau menolak yang kemudian diisolasi dari pergaulan dunia. Tantangan kedua, yaitu adanya ancaman memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air pada sebagian masyarakat Indonesia. Arus globalisasi telah membawa nilai-nilai universal (individualisme, hedonisme, dan liberalisme) yang melunturkan nilai-nilai nasional (gotong royong, tenggang rasa, dan sopan santun) sehingga menggeser pola pikir dan pola tindak masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan generasi muda.

Di era reformasi saat ini, kaum muda kurang peduli terhadap kegiatan yang berhubungan dengan patriotisme

dan nasionalisme. Gerakan Pramuka kurang diminati lagi oleh kaum muda, Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di anggap “kuno”, dan Peringatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai sebagai “ritual” belaka. Di samping itu, kaum muda saat ini lebih tertarik dengan gaya hidup yang berasal dari budaya Barat, baik dalam hal pola makan, pola minum maupun pola berpakaian. Tantangan ketiga, ialah muncul kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok etnis, suku, agama di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dapat menimbulkan konflik yang kemudian akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk. Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi seperti pada masa kolonialisme, yaitu dengan adanya adu domba.

Di samping adanya tantangan, menurut Kinichi O Mae (dalam Suwanda dkk, 2013:30), berkembangnya era globalisasi belakangan ini diramalkan akan berdampak pada berakhirnya sebuah negara bangsa yang disebabkan oleh empat hal, yaitu informasi, ideologi, investasi, dan invasi. Dengan konsep tersebut maka batasan politik, ekonomi, budaya, dan ideologi semakin kabur sehingga memungkinkan batas-batas kekuasaan atau kewenangan negara hilang yang diganti dengan isu global dengan segala resikonya. Pada tataran informasi hal tersebut dapat dibenarkan karena semua negara tidak akan mampu membendung arus informasi yang berasal dari manapun. Akan tetapi pada tataran yang lain negara tidak akan membiarkan ideologi asing, investasi, dan invasi untuk menguasai negara.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa globalisasi telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya beberapa permasalahan di atas ialah minimnya wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan “wawasan kebangsaan” di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia, melainkan “wawasan keglobalan” dan “wawasan kedaerahan” terutama pada generasi muda. Sebagai akibatnya, kondisi yang demikian sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan asing yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya serta bagaimana bangsa tersebut mengekspresikan kebangsaannya dalam lingkungan yang serba berubah. Wawasan kebangsaan tidak hanya merupakan tuntutan bagi bangsa untuk mewujudkan jati diri atau identitasnya, melainkan juga

pembinaan tata laku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai hakiki yang dimilikinya (Astawa, 2011:7).

Wawasan kebangsaan Indonesia berkembang dan mengkristal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia diwujudkan oleh bangsa Indonesia pada saat dicetuskannya Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda pada masa itu adalah upaya persatuan pemuda seluruh Indonesia yang ingin bersatu untuk melawan penjajah. Para pemuda seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke bergabung menjadi satu untuk berikrar tentang “satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia”. Namun semua itu akan menjadi dokumen kenangan saja apabila masyarakat Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan diperlukan sebagai filter nilai-nilai globalisasi yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menyikapi situasi dan kondisi yang demikian, maka perlu adanya perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan peningkatan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan payung hukum yang kuat, tegas, terperinci dan mengikat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan pada seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan salah satunya ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba diperlukan dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang memiliki pengikut sangat banyak dan selalu menjadikan wawasan kebangsaan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini adalah Nahdlatul Ulama (NU).

NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M dan menganut ajaran *ahlussunnah wal-jama'ah* (Muzadi, 2006:58). Nilai-nilai ajaran tersebut tersusun pada sebuah konsep NU yang di kenal dengan *mabadi' khoiru ummah* (dasar-dasar pembentukan masyarakat terbaik), yakni *as-Shidqu* (benar), *al-'Adalah* (adil), *al-Istiqomah*

(konsisten), *at-Ta'awun* (gotong royong), dan *al-Amanah wal wafa bi al-ahdi* (setia dan tepat janji) (Syihabuddin, 2013:42).

Nilai *as-Shidqu* berkorelasi dengan butir Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai *al-'Adalah* berkorelasi dengan butir Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai *al-Istiqomah* berkorelasi dengan butir Pancasila Persatuan Indonesia. Nilai *al-Amanah wal wafa bi al-ahdi* berkorelasi dengan butir Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai *at-Ta'awun* berkorelasi dengan butir Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 (Muzadi, 2006:30).

Di samping itu, NU memiliki unit kegiatan yang disebut “badan otonom”, yaitu unit kegiatan yang bertugas menggarap kelompok tertentu dari kaum *Nahdliyyin*. Badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU, *jam'iyah qurra' wal haffadz* dan sebagainya (Muzadi, 2006:109). Salah satu badan otonom NU yang terdiri atas pelajar atau mahasiswa adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan 24 Februari 1954 M ketika diselenggarakan Kongres LP Ma'arif di Semarang (Fadeli dan Subhan, 2007:52). Sejak berdirinya, IPNU menjadi bagian dari LP Ma'arif. Namun pada tahun 1966 ketika diselenggarakan Kongres IPNU di Surabaya, IPNU resmi melepaskan diri dari LP Ma'arif dan menjadi badan otonom NU. Salah seorang pendiri IPNU adalah Prof. Dr. K.H. M. Tolchah Mansur. Sejak berdirinya, IPNU merupakan kepanjangan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Namun sejak tahun 1988, melalui kongresnya yang ke-10 di Jombang (dikenal dengan Deklarasi Jombang), kepanjangan IPNU berganti menjadi Ikatan Putera Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan yang melarang adanya organisasi pelajar di sekolah selain OSIS. Namun setelah Orde Baru tumbang, di saat kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diperoleh dengan mudah, singkatan tersebut dikembalikan lagi seperti saat kelahirannya. Melalui kongresnya yang ke-14 di Surabaya (18-22 Juni 2003), kepanjangan IPNU kembali seperti semula yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Sedangkan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) didirikan pada tanggal 8 Rajab 1374 H bertepatan dengan 2 Maret 1955 M di Solo, Jawa Tengah (Fadeli dan Subhan, 2007:54-55). Salah seorang pendirinya adalah Ny. Umroh Mahfudzah. Sejak

berdirinya, IPPNU bernaung di bawah LP Ma'arif. Namun sejak tahun 1966 melalui kongresnya di Surabaya, IPPNU berdiri sendiri sebagai salah satu badan otonom NU. Sejak berdirinya, IPPNU merupakan kepanjangan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Namun sejak tahun 1988, melalui kongresnya yang ke-9 di Jombang (29-31 Januari 1988), kepanjangan IPPNU berganti menjadi Ikatan Puteri-Puteri Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan yang melarang adanya organisasi pelajar di sekolah selain OSIS. Namun setelah Orde Baru tumbang, di saat kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat diperoleh dengan mudah, singkatan tersebut dikembalikan lagi seperti saat kelahirannya. Melalui kongresnya yang ke-13 di Surabaya (18-22 Juni 2003), kepanjangan IPPNU kembali seperti semula yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) merupakan generasi penerus NU, pada generasi muda inilah ajaran NU diturunkan dan akan dikembangkan menjadi organisasi yang lebih maju. Selain itu, generasi muda NU ini sangat diperlukan, mengingat dalam periode 10-20 tahun ke depan generasi muda ini merupakan calon pemimpin masa depan bangsa yang sekaligus akan menjadi generasi inti dan diharapkan memiliki kualitas kemanusiaan yang lebih baik serta meneruskan nilai-nilai ajarannya tersebut kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Kader Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya tentang Wawasan Kebangsaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Kader Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya tentang Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah: (1) bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan, (2) bagi Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa, yaitu untuk mengetahui pentingnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan bagi generasi penerus bangsa.

Penelitian ini juga membahas tentang 4 sub materi wawasan kebangsaan, diantaranya: pengertian wawasan kebangsaan. Untuk dapat memahami pengertian wawasan kebangsaan, perlu kita pahami pengertian "bangsa" lebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:102), "bangsa" berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Otto

Bauer (dalam Suhady dan Sinaga, 2006:99), menyebutkan bahwa "bangsa" adalah suatu persatuan karakter/perangai yang timbul karena persatuan nasib. (*Eine Nation ist eine aus Schicksal gameinschaft erwachsene Character gemeinschaft*). Otto Bauer lebih menitik beratkan pengertian bangsa dan karakter, sikap dan perilaku yang menjadi jati diri bangsa dengan bangsa lain. Karakter ini terbentuk karena pengalaman sejarah, budaya, yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Lain halnya dengan Ernest Renan (dalam Suhady dan Sinaga, 2006:100), yang menyatakan bahwa "bangsa" adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu. Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari masing-masing warga untuk membentuk suatu bangsa.

Selain itu menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, "bangsa" menurut hukum adalah rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang satu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama (meskipun dalam bahasa-bahasa daerah), memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Dari definisi ini nampak bahwa "bangsa" adalah: (1) memiliki cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan, (2) memiliki sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan, (3) memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama, (4) memiliki karakter/perangai yang sama.

Setelah memahami pengertian "bangsa", selanjutnya kita pahami pengertian "kebangsaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:102), "kebangsaan" mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa; (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Sedangkan "wawasan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1271), berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan; dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wawasan kebangsaan juga diartikan sebagai cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya didasari oleh falsafah, cita-cita, dan tujuan nasional atau ideologinya serta kemungkinan penyesuaiannya di dunia yang terus berubah (Tim Sosialisasi Wasbang, 2005:21-22). Sedangkan menurut Hargo (2010:5), wawasan kebangsaan adalah usaha dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan warga negara sebagai

suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang warga negara terhadap eksistensi dan hal-hal yang terkait dengan bangsa dan negaranya (Darmono, 2010:18).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa aktualisasi wawasan kebangsaan akan berwujud pengetahuan warga negara serta rasa cinta, rasa hormat, rasa memiliki, ingin memajukan, ingin menjaga, ingin memartabatkan bangsa dan negaranya. Kemudian menurut Muladi dan Suyatno (2009:23), wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006:1).

Dari berbagai pengertian mengenai wawasan kebangsaan di atas, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah sama, yaitu tentang kesamaan cara pandang sebuah bangsa di dalam memandang diri dan lingkungannya yang berkaitan dengan cita-cita yang akan memberikan arah dan gairah hidup serta tujuan yang ingin dicapainya. Dalam konteks Indonesia cara pandang bangsa Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

Selanjutnya tentang nilai dasar wawasan kebangsaan. Menurut Suhady dan Sinaga (2006:25), nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: (a) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, (b) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, (c) Cinta akan tanah air dan bangsa, (d) Demokrasi atau kedaulatan rakyat, (e) Kesetiakawanan sosial, dan (f) Masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu, wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan bangsa dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kokoh.

Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat pula berwawasan sempit. Fasisme, Nazisme sebagai nasionalisme yang sempit jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Nazisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan Indonesia menegaskan, bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu dalam demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.

Kemudian tentang unsur wawasan kebangsaan. Dalam membicarakan wawasan kebangsaan, terdapat tiga unsur penting yang perlu dipahami, yaitu paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa, meliputi apa bangsa itu dan bagaimana mewujudkan masa depannya. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Yudhohusodo (1996:13), paham kebangsaan adalah aktualisasi dari rasa kebangsaan yang berupa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang bersifat rasional, dimana suatu bangsa secara bersama-sama memiliki cita-cita kehidupan berbangsa dan tujuan nasional yang jelas dan rasional. Paham kebangsaan itu dinamis, berkembang, dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya yang sangat kompleks sifatnya.

Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain, rasa kebangsaan itu adalah

perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri kita sebagai bangsa (Yudhohusodo, 1996:12). Adapun bentuk dari rasa kebangsaan ini ialah terciptanya rasa cinta terhadap tanah air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya serta melestarikan alam dan lingkungan. Sedangkan wujud dari rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dari tindakan masyarakat yang: (1) bangga menjadi orang Indonesia, (2) melestarikan budaya, (3) menggunakan produk lokal, (4) mengharumkan nama bangsa.

Di samping itu upaya dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan ini menjadi salah satu cara yang sangat penting mengingat pendidikan merupakan bagian dari sistem atau subsistem yang memiliki tujuan akhir yang bermuara pada pembangunan sebuah negara, baik pembangunan jiwa maupun raga setiap warga dari sebuah negara atau yang biasa disebut sebagai sebuah bangsa. Sistem pendidikan nasional di Indonesia pun merupakan sebuah subsistem dari pembangunan nasional.

Semangat kebangsaan atau yang biasa disebut dengan nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Menurut Yudhohusodo (1996:13), semangat kebangsaan adalah perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, berupa kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa, negara dan tanah airnya. Selain itu semangat kebangsaan atau nasionalisme juga diartikan sebagai tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya (Tim Sosialisasi Wasbang, 2005:27). Adapun wujud dari semangat kebangsaan ini tercermin dalam sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara atas nama sebuah bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:775), “nasionalisme” merupakan paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam

arti luas yaitu perasaan cinta/bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tidak memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit yaitu perasaan cinta/bangga terhadap tanah air dan bangsanya secara berlebihan dengan memandang bangsa lain lebih rendah derajatnya. Sedangkan patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme meliputi: (1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, (2) Sanggup/rela berkorban untuk bangsa dan negara, (3) mencintai tanah air dan bangsa, (4) bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, (5) menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, (6) memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan negara.

Patriotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:837), merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia istilah patriotisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*patris*" yang berarti tanah air. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa patriotisme mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (1) cinta tanah air, (2) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, (3) menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, (4) berjiwa pembaharuan dan tak kenal menyerah, (5) berjiwa pemburu. Di samping itu adapun bentuk pengamalan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Dalam Kehidupan Bernegara (1) membayar pajak secara tertib, (2) menjaga fasilitas-fasilitas umum seperti halte, terminal, dan telepon umum, (3) mengharumkan nama bangsa dalam dunia Internasional, misalnya menjadi juara olimpiade dan lomba-lomba lain di tingkat Internasional, (4) memberikan sumbangan devisa bagi negara, misalnya TKI yang bekerja di luar negeri, pengusaha yang membawa keuntungan perusahaannya di luar negeri ke Indonesia, (5) berpartisipasi aktif dalam ikut memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Kehidupan Bermasyarakat (1) ikut kerja bakti dalam memajukan daerahnya, (2) mendorong masyarakat melalui penyuluhan tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, (3) Menjadi orang tua asuh untuk membiayai pendidikan anak tidak mampu di lingkungannya, (4) menjaga nama baik masyarakat dengan tidak melakukan tindakan tercela, (4) menjaga dan mencegah agar lingkungan tetap sehat dalam arti fisik atau moral. **Dalam**

Kehidupan Berkeluarga (1) menjaga nama baik keluarga, (2) berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga, (3) orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya dengan bekerja keras mencari biaya, (4) tulus merelakan kepergian putra-putrinya menjadi guru di daerah terpencil.

Selanjutnya upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Menurut Astawa (2011:126-139) beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia meliputi: Bidang Ideologi (1) mewujudkan suatu pemikiran, pandangan, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (2) meningkatkan peranan aparatur pemerintah, masyarakat di forum-forum komunikasi dan penataran baik perorangan maupun kelompok masyarakat, (3) meningkatkan pelestarian nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara melalui penataran dan pengamalan baik oleh pribadi maupun oleh penyelenggara negara sesuai dengan norma-norma budaya bangsa Indonesia, (4) mengembangkan nilai-nilai instrumen Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu mengadaptasi nilai-nilai baru dan menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa. Bidang Politik (1) meningkatkan pelayanan hukum bagi seluruh rakyat dan terwujudnya sistem peradilan yang efektif serta berkembangnya budaya politik, (2) reformasi politik, yaitu perubahan dan pembaharuan harus tetap dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, gradual, tepat sasaran dan sesuai dengan urgensi, (3) pendidikan politik, yaitu dengan cara memberikan ruang gerak yang luas kepada lembaga infrastruktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi di dalam pendidikan politik serta mengadakan pendekatan dan pembinaan yang efektif dan intensif terhadap kelompok-kelompok masyarakat agar menyadari fungsi dan peranannya di era globalisasi reformasi ini, (4) penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum.

Bidang Sosial Budaya (1) masyarakat diarahkan pada pergaulan yang maju tanpa meninggalkan semangat kekeluargaan sesuai dengan kepribadian serta kehidupan masyarakat, (2) pembinaan kebudayaan nasional dilakukan sesuai dengan aspirasi nasional dan penerapan unsur-unsur budaya asing dilakukan berdasarkan azas manfaat, (3) menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar terhadap kewajiban dan hak-haknya yang memiliki rasa setia kawan dalam berperan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan masing-masing, (4) mengembangkan kehidupan manusia berbudaya dan berkepribadian Indonesia dalam iklim kerukunan nasional yang berdasarkan kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial. Bidang Non Fisik Hankam (1) mensosialisasikan UUD 1945 pasal 30 tentang kewajiban warga negara

untuk ikut serta dalam pembelaan negara, (2) meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara secara mendalam pada segenap rakyat Indonesia yang disertai oleh kemanunggalan TNI dengan rakyat, (3) adanya konsepsi dari Polri yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga Kamtibmas secara terprogram dan terorganisir, (4) pembuatan UU wajib militer untuk seluruh masyarakat Indonesia sesuai persyaratan yang ada yang disesuaikan dengan kemampuan kondisi keuangan negara.

Bidang Fisik Hankam (1) menerapkan gerakan disiplin nasional bagi semua masyarakat Indonesia dengan mengerahkan supra dan infra struktur yang ada, (2) meningkatkan sistem keamanan Swakarsa, (3) melaksanakan wajib militer sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, (4) menyiapkan kekuatan pertahanan yang dapat dikerahkan dalam setiap waktu untuk melakukan tindakan militer demi mempertahankan kemerdekaan. Bidang Hukum (1) mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang menghormati, mematuhi, dan menjadikan hukum sebagai pedoman di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan, (2) mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang disiplin pada hak-hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (3) mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang menjadikan hukum sebagai panglima dan bukan sebagai alat kekuasaan yang berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan pangkat, tingkat, dan kedudukan di masyarakat, (4) mewujudkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam rangka terciptanya peradilan yang efektif, ketentraman masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pada penelitian ini didasari oleh teori perkembangan moral Thomas Lickona, bapak karakter dari *State University of New York, Cortland*. Lickona menyatakan bahwa adanya proses perkembangan moral yang melibatkan pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*) sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan wawasan kebangsaan yang koheren dan komprehensif. Dari ketiga proses tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan karena untuk dapat memahami wawasan kebangsaan diperlukan pengetahuan, wawasan yang memadai dari Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan (*moral knowing*). Hal ini bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran dari Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam wawasan kebangsaan tersebut (*moral feeling*) sehingga diharapkan nantinya Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa mampu mewujudkan sikap yang berwawasan

kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (*moral action*).

METODE

Penelitian yang berjudul pemahaman Kader Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya tentang wawasan kebangsaan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini di Sekretariat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya yang beralamat di Jalan Ketintang Madya No. 63 Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa yang dalam hal ini jumlah dari seluruh Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa berjumlah 120 orang. Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 25% dari jumlah keseluruhan populasi. Adapun rumus dari pengambilan sampel sebagai berikut:

$$n = \% \times N$$

Keterangan:

n = besar sampel

N = besar populasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tes. Tes digunakan dengan tujuan untuk mengukur pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan.

Adapun kisi-kisi dari lembar tes yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan mengacu pada taksonomi Bloom yang meliputi C1 yaitu pengetahuan (*knowledge*) ialah berisikan kemampuan untuk menghafal, mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar. C2 yaitu pemahaman (*comprehension*) ialah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri, mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengelompokkan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, mendeskripsikan, dan menyatakan gagasan utama (terjemahan, pemaknaan, dan *ekstrapolasi*). C3 yaitu penerapan (*application*) ialah kemampuan menggunakan/menerapkan gagasan, informasi, teori, metode, rumus, dan aturan pada situasi baru di dalam kondisi kerja.

C4 yaitu analisa (*analysis*) ialah kemampuan menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi

atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit, serta kemampuan untuk mengurai pemikiran yang kompleks, dan mengenai bagian-bagian serta hubungannya. C5 yaitu sintesa (*synthesis*) ialah kemampuan untuk menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, mampu mengenali data dan informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan atau kemampuan mengumpulkan komponen yang sama guna membentuk satu pola pemikiran yang baru. C6 yaitu evaluasi (*evaluation*) ialah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya atau kemampuan membuat pemikiran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat digunakan untuk mengukur hal-hal yang akan diukur. Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kelayakan dari instrumen tes. Cara mengukur validitas ini dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total melalui rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

N = Jumlah sampel/responden

X = Skor variabel X

Y = Skor variabel Y

Penelitian ini didahului dengan melakukan uji validitas instrumen tes. Langkah tersebut dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu instrumen sebelum diujicobakan kepada sampel penelitian. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengujicobakan 40 butir pertanyaan tentang wawasan kebangsaan kepada 30 orang Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa. Instrumen tes yang telah diujicobakan kemudian diukur validitasnya melalui rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar. Hasil pengujian validitas untuk setiap butir pertanyaan kemudian diinterpretasikan dengan tabel kritik *product moment* dengan taraf signifikansi 5% yang memiliki nilai korelasi tabel sebesar 0,361. Apabila nilai korelasi hasil

perhitungan dari setiap butir pertanyaan > 0,361, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid atau layak. Namun sebaliknya, apabila nilai korelasi hasil perhitungan dari setiap butir pertanyaan < 0,361, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidak layak.

Berdasarkan hasil perhitungan validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 40 butir pertanyaan terdapat 30 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Harga korelasi hitung dari setiap butir pertanyaan sebelumnya telah diinterpretasikan dengan harga korelasi tabel sebesar 0,361 karena jumlah peserta uji coba instrumen sebesar 30 orang dan terletak pada taraf signifikansi 0,05. Apabila $r_{hitung} > 0,361$, maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Jumlah pertanyaan yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini sebanyak 30 butir pertanyaan yang diambil berdasarkan urutan pertanyaan yang memiliki validitas tinggi. Hasil perhitungan validitas tersebut menunjukkan bahwa instrumen pada penelitian ini layak digunakan untuk mengukur data yang bersifat kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase. Adapun rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Hasil akhir dalam persentase

n = Nilai yang diperoleh dari hasil tes

N = Jumlah responden

Sebelum melakukan persentase, terlebih dahulu dilakukan penentuan skor terhadap jawaban yang diberikan oleh responden dalam tes sebagai berikut:

Setiap jawaban benar mendapatkan skor = 1

Setiap jawaban salah mendapatkan skor = 0

Setelah menentukan skor atas jawaban dari tes, maka diperlukan penentuan kriteria penilaian. Kriteria penilaian dalam penelitian ini merujuk pada kriteria penilaian yang dibuat oleh Riduwan. Adapun kriteria penilaian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No.	Skor	Kriteria Penilaian
1.	0% - 20%	Sangat Kurang Baik tentang Wawasan Kebangsaan
2.	21% - 40%	Kurang Baik tentang Wawasan Kebangsaan
3.	41% - 60%	Cukup Baik tentang Wawasan Kebangsaan
4.	61% - 80%	Baik tentang Wawasan Kebangsaan
5.	81% - 100%	Sangat Baik tentang Wawasan Kebangsaan

Sumber: (Riduwan, 2013:89)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Pengertian Wawasan Kebangsaan

Berikut akan dipaparkan hasil perhitungan sub materi pengertian wawasan kebangsaan yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Pengertian Wawasan Kebangsaan

No.	Indikator	Jumlah Jawaban Responden	
		Benar	Salah
1.	Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan secara etimologi	26	4
2.	Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan secara harfiah	26	4
3.	Menafsirkan landasan yang menjadi dasar wawasan kebangsaan negara Indonesia	23	7
Jumlah = $26+26+23 = 75$ = $\frac{75}{90} \times 100\% = 83\%$			
Kriteria = Sangat Baik			

Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada sub materi pengertian wawasan kebangsaan tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 83%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa sangat baik dalam memahami sub materi pengertian wawasan kebangsaan.

Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Berikut akan dipaparkan hasil perhitungan sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

No.	Indikator	Jumlah Jawaban Responden	
		Benar	Salah
4.	Menyebutkan Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan	15	15
5.	Menyebutkan nilai dasar wawasan kebangsaan yang bersifat mendasar dan fundamental	21	9
6.	Menganalisis perwujudan nilai dasar wawasan kebangsaan	22	8
7.	Menganalisis nilai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa	15	15
8.	Menganalisis nilai tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu	16	14
9.	Menganalisis nilai cinta tanah air dan bangsa	16	14
10.	Menganalisis nilai kesetiakawanan sosial	29	1
11.	Menganalisis nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat	30	0
Jumlah = $15+21+22+15+16+16+29+30 = 164$ = $\frac{164}{240} \times 100\% = 68\%$			
Kriteria = Baik			

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan tergolong dalam kriteria baik. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 68%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa baik dalam memahami sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan.

Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Unsur Wawasan Kebangsaan

Berikut akan dipaparkan hasil perhitungan sub materi unsur wawasan kebangsaan yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Unsur Wawasan Kebangsaan

No.	Indikator	Jumlah Jawaban Responden	
		Benar	Salah
12.	Menyebutkan unsur wawasan kebangsaan	21	9
13.	Menjelaskan pengertian paham kebangsaan	23	7
14.	Menjelaskan pengertian rasa kebangsaan	19	11
15.	Menganalisis perilaku yang mencerminkan rasa kebangsaan	23	7
16.	Menjelaskan pengertian semangat kebangsaan	17	13
17.	Menjelaskan wujud dari semangat kebangsaan	30	0
18.	Menjelaskan pengertian nasionalisme	18	12
19.	Menjelaskan pengertian nasionalisme dalam arti luas	22	8
20.	Menjelaskan pengertian nasionalisme dalam arti sempit	22	8
21.	Menjelaskan pengertian patriotisme	29	1
22.	Menganalisis perilaku yang mencerminkan sikap patriotisme	21	9
23.	Menganalisis perilaku yang mencerminkan sikap patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat		
24.	Menganalisis perilaku yang mencerminkan sikap patriotisme dalam kehidupan berkeluarga		
Jumlah = 21+23+19+23+17+30+18+22+22+29+21+27+26 = 298 = $\frac{298}{390} \times 100\% = 76\%$			
Kriteria = Baik			

Berdasarkan tabel 4 diatas bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada sub materi unsur wawasan kebangsaan tergolong dalam kriteria baik. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 76%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa baik dalam memahami sub materi unsur wawasan kebangsaan.

Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Upaya dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

Berikut akan dipaparkan hasil perhitungan sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada Sub Materi Upaya dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

No.	Indikator	Jumlah Jawaban Responden	
		Benar	Salah
25.	Menyebutkan upaya yang termasuk dalam meningkatkan wawasan kebangsaan	22	8
26.	Menganalisis upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di bidang ideologi	16	14
27.	Menganalisis upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di bidang politik	25	5
28.	Menganalisis upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di bidang sosbud	21	9
29.	Menganalisis upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di bidang hankam	27	3
30.	Menganalisis upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di bidang hukum	24	6
Jumlah = 22+16+25+21+27+24 = 135 = $\frac{135}{180} \times 100\% = 75\%$			
Kriteria = Baik			

Berdasarkan tabel 5 di atas bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan tergolong dalam kriteria baik. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa baik dalam memahami sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan.

Hasil dari data di atas menunjukkan bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa berdasarkan sub materi wawasan kebangsaan yang tertinggi ialah terdapat pada sub materi pengertian wawasan kebangsaan yaitu sebesar 83% yang tergolong dalam kriteria sangat baik. Sedangkan pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa berdasarkan sub materi

wawasan kebangsaan yang terendah ialah terdapat pada sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan yaitu sebesar 68% yang tergolong dalam kriteria baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa terkait dengan pemahaman wawasan kebangsaan diketahui bahwa pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa pada sub materi pengertian wawasan kebangsaan tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal ini didasarkan pada perolehan persentase jawaban benar yaitu sebesar 83%. Untuk sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan, pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tergolong dalam kriteria baik. Hal ini didasarkan pada perolehan persentase jawaban benar yaitu sebesar 68%. Selanjutnya untuk sub materi unsur wawasan kebangsaan, pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tergolong dalam kriteria baik. Hal ini didasarkan pada perolehan persentase jawaban benar yaitu sebesar 76%. Kemudian untuk sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa juga tergolong dalam kriteria baik. Hal ini didasarkan pada perolehan persentase jawaban benar yaitu sebesar 75%. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa memiliki pemahaman yang baik dalam memahami wawasan kebangsaan.

Jika hal ini dikaitkan dengan pentingnya tiga komponen karakter yang baik menurut Thomas Lickona, yaitu tentang *moral knowing* (pengetahuan moral), sebuah pemberian pemahaman kepada anak, misalnya memberi pemahaman kepada anak tentang arti kebaikan, mengapa harus berperilaku baik, untuk apa berperilaku baik, dan apa manfaat berperilaku baik, maka secara tidak langsung menjelaskan bahwa pengetahuan yang selama ini telah diperoleh Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan melalui organisasi IPNU-IPPNU Unesa dapat menciptakan suatu pemahaman yang baik bagi Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil tes yang telah diujikan kepada 30 orang responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa memiliki pengetahuan yang baik (*moral knowing*) dalam memahami Wawasan Kebangsaan.

Kemudian tentang *moral feeling* (perasaan moral), yaitu aspek emosi yang harus ditanamkan dan mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter, misalnya membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang nantinya akan menjadi sumber energi yang dimiliki oleh anak tersebut untuk berperilaku baik. Kaitannya dengan hal ini Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa diajarkan tentang *mabadi' khoiru ummah* (dasar-dasar pembentukan masyarakat terbaik) yang meliputi *as-*

Shidqu (benar), *al-'Adalah* (adil), *al-Istiqomah* (konsisten), *at-Ta'awun* (gotong royong), dan *al-Amanah wal wafa bi al-ahdi* (setia dan tepat janji). Jika dicermati secara lebih mendalam, nilai-nilai tersebut berkorelasi dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sehingga dengan diajarkannya ajaran tersebut menurut Thomas Lickona akan tercipta *moral action* (tindakan moral), yaitu perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari kedua komponen karakter yang lainnya dan perbuatan tersebut diharapkan mampu untuk dilakukan secara berulang-ulang agar menjadi *moral behavior*.

Hal ini dapat dilihat ketika peristiwa meletusnya Gunung Kelud di Kediri, sebagai bagian dari warga negara Indonesia Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi dengan terlibat dalam misi kemanusiaan meringankan beban korban bencana Gunung Kelud tersebut. Bentuk kepedulian sosial tersebut dilakukan dengan cara menggalang dana dan turut berpartisipasi langsung di lapangan dengan mendirikan posko kesehatan dan dapur umum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan (*moral action*).

Berdasarkan penjelasan ketiga komponen karakter di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan yang utuh mengolah tiga aspek sekaligus, yaitu *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Hal ini mengandung arti bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait satu sama lain. *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral) tidak berfungsi secara terpisah melainkan satu sama lain saling merasuki dan saling mempengaruhi dalam segala hal. Ketiganya bekerjasama secara kompleks dan simultan sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan kita tidak menyadarinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemahaman Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa tentang wawasan kebangsaan dapat disimpulkan bahwa Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa memiliki pemahaman yang sangat baik pada sub materi (1) pengertian wawasan kebangsaan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 83%. Kemudian pada sub materi (2) nilai dasar wawasan kebangsaan, (3) unsur wawasan kebangsaan, dan (4) upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan memiliki pemahaman yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase jawaban benar sebesar 68% pada sub materi nilai dasar wawasan kebangsaan, 76% pada sub materi unsur wawasan kebangsaan, dan 75% pada sub materi upaya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada Kader PKPT IPNU-IPPNU Unesa untuk lebih memperdalam lagi ilmu tentang wawasan kebangsaan, dengan cara lebih aktif mencari tahu dan banyak mempelajari dengan membaca buku, serta berdiskusi terkait dengan wawasan kebangsaan guna memperdalam kompetensi sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi kader yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, Dewa Nyoman Wija. 2011. *Pola Pikir Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Surabaya: Paramita.
- Darmono, Bambang. 2010. *Makalah Pembekalan Kepada Perwira Siswa Sesko Ketiga Angkatan*. Bandung: Graha Widya Dirgantara.
- Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan. 2007. *Antologi NU Buku I: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista.
- Fakih, Mansour. 2011. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hargo, Dody Usodo. 2010. *Makalah Kuliah Umum Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia Dalam Rangka Membangun Ketahanan Nasional*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Muladi dan Adi Suyatno. 2009. *Kepemimpinan Nasional*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia.
- Muzadi, KH Abdul Muchith. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012. *Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riduwan. 2013. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Suhady, Idup dan A.M. Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Suwanda, I.M. dkk. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Syihabuddin, Mohammad. 2013. *Teologi Cinta-Kasih*. Yogyakarta: Aura Pustaka.

Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. 2005. *Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Yudhohusodo, Siswono. 1996. *Semangat Baru Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Bangsa.